

Politik Kekuasaan dan Arah Ekonomi Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1. Gagasan Utama



Arah ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh angka makro saja, tetapi juga oleh relasi kekuasaan antara negara, elite politik, bisnis besar, birokrasi, pasar, dan masyarakat. Tantangannya adalah membangun negara yang kuat, produktif, dan akuntabel.

2.

Aktor Penentu Arah Ekonomi



Negara
kebijakan fiskal, regulasi, infrastruktur



Elite Politik
prioritas program, koalisi, distribusi kekuasaan



Bisnis & Oligarki
investasi, lobi, akses sumber daya



BUMN & Danantara
aset strategis, pembiayaan pembangunan



Pasar Global
modal, perdagangan, nilai tukar



Masyarakat
pekerja, UMKM, konsumen, daerah

3.

Kondisi Ekonomi Indonesia



Pertumbuhan ekonomi Q1 2026:

5,61%



Inflasi Mei 2026:

3,08%



BI-Rate Mei 2026:

5,25%



Defisit APBN 2026:

2,68%
PDB

Ekonomi relatif tumbuh, tetapi tetap menghadapi tekanan fiskal, nilai tukar, biaya subsidi, dan kebutuhan pekerjaan berkualitas.

4.

Arena Politik Kekuasaan



Akses sumber daya



Pengaruh kebijakan



Pembentukan aturan



Distribusi manfaat



Reproduksi kekuasaan



Ketika akses terhadap modal, informasi, dan pengambilan keputusan tidak seimbang, ekonomi mudah berubah menjadi arena rente dan dominasi.

5.

Tantangan Strategis



Populisme fiskal
program populer vs keberlanjutan



State capture
elite menguasai aturan



Ketimpangan wilayah
Jawa dominan, daerah tertinggal



Ketergantungan eksternal
komoditas & utang luar negeri



Kerusakan lingkungan
biaya ekologis semakin tinggi



Demokrasi ekonomi melemah
partisipasi warga terbatas

6.

Agenda Ekonomi yang Perlu Diperkuat



Belanja publik lebih produktif
fokus pada kualitas dan dampak



Hilirisasi naik kelas ke industrialisasi
nilai tambah tinggi, kerja berkualitas



BUMN profesional & transparan
tata kelola baik, orientasi kinerja



UMKM, pekerja, dan daerah diperkuat
akses pembiayaan, pasar, dan inovasi



Transformasi digital yang etis
inklusif, aman, berkelanjutan



Institusi kuat dan akuntabel
hukum tegak, bebas korupsi

Tujuan ekonomi bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga keadilan, mobilitas sosial, dan keberlanjutan.

7.



Masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada bagaimana kekuasaan dikelola: apakah untuk memperluas kesejahteraan bersama, atau hanya memperkuat rente dan kepentingan elite.



Ekonomi Indonesia yang sehat memerlukan negara yang kapabel, pasar yang adil, dan masyarakat yang berdaya.



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

27 Juni 2026

POLITIK KEKUASAAN DAN ARAH EKONOMI INDONESIA

Abstrak

Artikel ini membahas relasi antara politik kekuasaan dan arah ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi politik kritis. Ekonomi Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui indikator makro seperti pertumbuhan, inflasi, investasi, ekspor, konsumsi rumah tangga, atau stabilitas nilai tukar. Di balik angka-angka tersebut terdapat konfigurasi kekuasaan: negara, elite politik, kelompok bisnis besar, birokrasi, partai politik, pemerintah daerah, BUMN, pasar modal, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Arah ekonomi nasional merupakan hasil dari pertarungan, kompromi, dan negosiasi di antara aktor-aktor tersebut. Pada satu sisi, Indonesia membutuhkan negara yang kuat untuk mempercepat industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan, transisi energi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pada sisi lain, negara yang kuat tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi negara rente, negara patronase, atau negara yang mudah ditangkap oleh kepentingan oligarkis.

Kondisi kontemporer menunjukkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan penting. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tercatat 5,61% secara tahunan menurut BPS, tetapi perekonomian tetap menghadapi tekanan inflasi, nilai tukar, fiskal, biaya subsidi, kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta tuntutan penciptaan pekerjaan berkualitas. Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08% secara tahunan, sementara Bank Indonesia menaikkan BI-Rate pada Mei 2026 untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran. APBN 2026 dirancang dengan defisit terkendali 2,68% dari PDB, tetapi ruang fiskal tetap diuji oleh

program prioritas, subsidi energi, belanja sosial, dan agenda pembangunan besar. Dengan menggunakan kerangka ekonomi politik institusional, artikel ini berargumen bahwa arah ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kekuasaan: apakah kekuasaan digunakan untuk membangun institusi inklusif, produktivitas nasional, dan kesejahteraan rakyat, atau justru memperkuat konsentrasi rente, ketimpangan, dan ketergantungan struktural.

Kata kunci: *ekonomi politik Indonesia, kekuasaan, pembangunan, oligarki, negara, pasar, APBN, hilirisasi, demokrasi ekonomi, institusi inklusif.*

1. Pendahuluan: Ekonomi Indonesia sebagai Arena Kekuasaan

Membicarakan arah ekonomi Indonesia berarti membicarakan lebih dari sekadar pertumbuhan Produk Domestik Bruto, inflasi, kurs rupiah, suku bunga, investasi, ekspor, atau defisit anggaran. Semua indikator tersebut penting, tetapi tidak cukup. Angka-angka ekonomi hanyalah permukaan dari proses yang lebih dalam, yaitu proses politik kekuasaan. Siapa yang menentukan prioritas pembangunan? Siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya? Siapa yang menikmati insentif fiskal? Siapa yang memperoleh konsesi tanah, tambang, hutan, proyek infrastruktur, akses kredit, atau perlindungan regulasi? Siapa yang menanggung biaya ketika terjadi krisis? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah arena distribusi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kekuasaan dan ekonomi mempunyai akar historis yang panjang. Pada masa Orde Baru, negara tampil sebagai pengendali utama pembangunan melalui stabilitas politik, teknokrasi ekonomi, ekspansi birokrasi, BUMN, kredit terarah, dan jaringan bisnis-politik. Setelah Reformasi 1998, Indonesia bergerak ke arah demokrasi elektoral, desentralisasi, liberalisasi politik, dan pembukaan

ruang pasar. Namun, perubahan institusional tersebut tidak otomatis menghapus relasi oligarkis. Hadiz dan Robison menunjukkan bahwa perkembangan Indonesia pasca-Soeharto lebih tepat dibaca sebagai reorganisasi kekuasaan oligarkis dalam institusi demokrasi dan pasar baru, bukan sebagai pemutusan total dari struktur lama. ([Find an Expert](#))

Ekonomi Indonesia kontemporer dengan demikian berada dalam ketegangan permanen. Di satu sisi, negara perlu hadir secara aktif untuk mendorong transformasi struktural: hilirisasi mineral, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, ketahanan pangan, penguatan energi, pengembangan SDM, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, semakin besar peran negara, semakin besar pula risiko penyalahgunaan diskresi, patronase, pemborosan fiskal, konflik kepentingan, dan state capture. Persoalan utama bukanlah apakah negara harus kuat atau lemah, melainkan negara kuat seperti apa: negara yang kapabel dan akuntabel, atau negara yang kuat tetapi tertutup, sentralistis, dan mudah dipengaruhi elite.

2. Kerangka Teoretis: Ekonomi Politik Kekuasaan

Ekonomi politik melihat ekonomi bukan sebagai sistem teknis yang netral, melainkan sebagai sistem sosial yang dibentuk oleh kekuasaan, institusi, ideologi, kepentingan, dan konflik distribusi. Dalam pendekatan ini, pasar bukan mekanisme alamiah yang berdiri sendiri. Pasar memerlukan hukum, mata uang, kontrak, keamanan, infrastruktur, pengadilan, birokrasi, dan legitimasi politik. Dengan kata lain, pasar selalu dibentuk oleh negara. Namun negara juga tidak netral, karena negara sendiri merupakan arena perebutan kepentingan.

Douglass North menempatkan institusi sebagai "aturan main" yang membentuk insentif dan perilaku ekonomi. Institusi yang kuat mampu menurunkan biaya transaksi, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong investasi jangka panjang. Namun, institusi juga dapat bersifat ekstraktif apabila aturan main dirancang untuk menguntungkan kelompok

kecil yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Acemoglu, Johnson, dan Robinson menegaskan bahwa perbedaan kemakmuran antarnegara banyak dipengaruhi oleh kualitas institusi politik dan ekonomi: apakah institusi itu inklusif atau ekstraktif. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan pokoknya adalah apakah institusi negara dan pasar mampu memperluas peluang bagi masyarakat luas, atau justru mempertahankan konsentrasi keuntungan bagi kelompok terbatas.

Teori regulatory capture dari Stigler juga penting untuk membaca ekonomi Indonesia. Regulasi tidak selalu hadir sebagai alat kepentingan publik. Dalam banyak kasus, kelompok bisnis besar dapat memengaruhi isi regulasi, desain izin, standar teknis, pajak, tarif, kuota, atau subsidi agar sesuai dengan kepentingan mereka. State capture lebih jauh lagi: bukan hanya pelaksanaan aturan yang dibajak, melainkan pembentukan aturan itu sendiri diarahkan untuk kepentingan sempit. Di sinilah politik kekuasaan bertemu langsung dengan arah ekonomi.

Dalam konteks negara berkembang, Peter Evans membedakan negara predatori dan negara pembangunan. Negara predatori menggunakan kekuasaan publik untuk kepentingan elite sempit. Negara pembangunan menggunakan kapasitas birokratik, koordinasi, dan hubungan produktif dengan sektor swasta untuk mendorong transformasi industri. Tantangan Indonesia adalah membangun negara pembangunan yang demokratis: negara yang mampu mengarahkan ekonomi, tetapi tetap dikontrol oleh hukum, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

3. Kondisi Makroekonomi Indonesia: Stabilitas, Pertumbuhan, dan Tekanan

Secara makro, Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61% secara tahunan; PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Namun, struktur spasial ekonomi masih sangat terpusat: Pulau Jawa

menyumbang 57,24% struktur ekonomi nasional pada kuartal I 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global. Kedua, pertumbuhan tersebut masih menghadapi persoalan konsentrasi wilayah, terutama dominasi Jawa dibandingkan kawasan timur dan luar Jawa.

Inflasi juga menjadi perhatian. BPS mencatat inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,08%, inflasi bulanan 0,28%, dan inflasi tahun kalender 1,35%. Inflasi tertinggi pada level provinsi terjadi di Papua Barat sebesar 5,94%, sedangkan terendah di Lampung sebesar 1,94%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini mengingatkan bahwa inflasi bukan hanya persoalan nasional rata-rata, melainkan juga persoalan spasial. Bagi rumah tangga miskin dan rentan, kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi memiliki dampak lebih besar daripada bagi kelompok berpendapatan tinggi.

Bank Indonesia merespons tekanan stabilitas dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada Mei 2026. BI menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah menghadapi gejolak global, menjaga inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027, serta mempertahankan fokus kebijakan moneter pro-stability. ([Bank Indonesia](#)) Di sini terlihat dilema klasik kebijakan ekonomi: stabilitas nilai tukar dan inflasi memerlukan disiplin moneter, tetapi suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan pembiayaan, investasi, konsumsi, dan pertumbuhan sektor riil.

IMF pada Januari 2026 menilai ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah guncangan eksternal, dengan proyeksi pertumbuhan 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Namun IMF juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan, ruang fiskal, dan reformasi struktural agar pertumbuhan dapat berkelanjutan, inklusif, dan produktif. ([IMF](#)) Pernyataan ini penting karena stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada angka saat ini, tetapi pada kepercayaan pasar, konsistensi kebijakan, efektivitas institusi, dan kemampuan negara mengelola ekspektasi.

4. APBN sebagai Instrumen Kekuasaan Ekonomi

APBN bukan sekadar dokumen teknis keuangan negara. APBN adalah dokumen politik paling penting dalam ekonomi nasional. Di dalam APBN terlihat pilihan kekuasaan: sektor apa yang diprioritaskan, kelompok mana yang dilindungi, daerah mana yang memperoleh transfer, program mana yang diperbesar, subsidi apa yang dipertahankan, pajak siapa yang dinaikkan, dan risiko apa yang dialihkan kepada masa depan melalui utang.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa APBN 2026 disusun dengan defisit terkendali 2,68% dari PDB. Struktur APBN 2026 yang disetujui menunjukkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp689,1 triliun. Pada halaman lain, dokumen yang sama menekankan bahwa defisit tersebut lebih rendah daripada outlook 2025 dan tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas, dengan kebijakan pembiayaan yang memprioritaskan sumber utang domestik, pengelolaan portofolio utang, pendalaman pasar keuangan domestik, serta pembiayaan inovatif seperti PPP.

Dari perspektif ekonomi politik, APBN 2026 memperlihatkan dilema antara ekspansi pembangunan dan kehati-hatian fiskal. Pemerintah ingin mempertahankan pertumbuhan dan menjalankan program prioritas, tetapi pada saat yang sama harus menjaga defisit, beban bunga utang, kepercayaan investor, dan stabilitas nilai tukar. Di sini, politik kekuasaan bekerja melalui proses alokasi. Setiap rupiah APBN adalah keputusan politik: apakah diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial, pertahanan, birokrasi, proyek strategis, atau insentif industri.

Masalahnya bukan apakah belanja negara besar atau kecil, tetapi apakah belanja itu produktif, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari rente. Belanja sosial dapat memperkuat keadilan apabila menjangkau kelompok rentan secara akurat. Tetapi belanja sosial juga dapat menjadi instrumen populisme fiskal apabila dirancang terutama untuk popularitas politik

tanpa tata kelola yang kuat. Belanja infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas apabila menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, logistik, kawasan industri, dan pasar. Tetapi belanja infrastruktur juga dapat menjadi sumber pemborosan apabila proyek dipilih karena kepentingan politik, bukan manfaat ekonomi.

5. Program Prioritas, Populisme Fiskal, dan Tata Kelola

Salah satu isu penting dalam arah ekonomi kontemporer Indonesia adalah program prioritas berskala besar. Program makan bergizi gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang kuat: meningkatkan gizi, mendukung pendidikan anak, membantu keluarga, dan menciptakan permintaan ekonomi lokal. Tetapi program berskala besar juga menimbulkan tantangan fiskal, logistik, pengawasan, dan tata kelola. Reuters melaporkan bahwa Indonesia pada Juni 2026 mempertimbangkan pengurangan belanja program makan gratis lebih dari US\$2 miliar atau sekitar Rp40–50 triliun dari anggaran Rp268 triliun, dengan kemungkinan pengurangan penerima dari 62,5 juta menjadi 49 juta serta penundaan ekspansi dapur baru.

([Reuters](#)) Reuters kemudian melaporkan bahwa Menteri Keuangan menyatakan pemerintah berencana mengurangi belanja program tersebut sekitar Rp40 triliun untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga defisit tetap di bawah ambang 3% PDB. ([Reuters](#))

Dari sisi politik, program semacam ini memiliki daya tarik besar karena langsung menyentuh rakyat. Namun dari sisi ekonomi politik, program berskala sangat besar dapat menciptakan tiga risiko. Pertama, risiko fiskal: apabila pembiayaan tidak berkelanjutan, program dapat menekan ruang belanja produktif lain seperti pendidikan, kesehatan, riset, dan infrastruktur dasar. Kedua, risiko tata kelola: pengadaan pangan, dapur, distribusi, standar gizi, kontrak vendor, dan pengawasan daerah dapat menjadi ladang rente jika transparansi lemah. Ketiga, risiko institusional: program yang terlalu bergantung pada komando politik pusat dapat mengabaikan kapasitas lokal, variasi kebutuhan daerah, dan mekanisme partisipatif.

Namun kritik terhadap program prioritas tidak berarti menolak perlindungan sosial. Justru sebaliknya, perlindungan sosial perlu diperkuat, tetapi harus berbasis data, tepat sasaran, akuntabel, dan terintegrasi dengan agenda produktivitas. Program makan bergizi akan lebih kuat bila dikaitkan dengan pertanian lokal, koperasi produsen, UMKM pangan, standar keamanan pangan, pendidikan gizi, penguatan ekonomi desa, dan sistem audit terbuka. Dengan begitu, program sosial tidak berhenti sebagai konsumsi fiskal, tetapi menjadi instrumen pembangunan manusia dan ekonomi lokal.

6. Danantara, BUMN, dan Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi Negara

Peran negara dalam ekonomi Indonesia juga tampak melalui BUMN dan lembaga investasi negara. Reuters melaporkan bahwa Danantara diluncurkan dengan mandat mengelola sekitar US\$900 miliar aset negara di sekitar 1.000 perusahaan, sementara analis mengingatkan bahwa peran yang sangat luas dan politis dapat menguji kredibilitas serta efektivitas operasionalnya. ([Reuters](#)) Sebelumnya, Reuters juga melaporkan bahwa Danantara dirancang sebagai sovereign wealth fund baru yang akan berinvestasi dalam proyek-proyek berdampak tinggi seperti energi terbarukan, manufaktur maju, hilirisasi, dan produksi pangan. ([Reuters](#))

Dari perspektif pembangunan, lembaga semacam Danantara dapat menjadi instrumen strategis. Indonesia membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk industrialisasi, transisi energi, hilirisasi mineral, manufaktur bernilai tambah, teknologi digital, pangan, dan infrastruktur. Pasar keuangan domestik belum sepenuhnya mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang dalam skala besar. Karena itu, lembaga investasi negara dapat memainkan peran sebagai katalis.

Namun dari perspektif ekonomi politik, konsentrasi aset besar di bawah lembaga yang dekat dengan kekuasaan eksekutif membawa risiko. Risiko pertama adalah konflik antara tujuan komersial dan tujuan politik. Jika proyek dipilih berdasarkan kalkulasi politik, bukan kelayakan ekonomi,

maka aset publik dapat terpapar kerugian. Risiko kedua adalah moral hazard. Apabila pasar percaya bahwa semua proyek didukung negara, disiplin risiko dapat melemah. Risiko ketiga adalah transparansi. Semakin besar dana publik dan aset BUMN yang dikelola, semakin besar kebutuhan audit independen, pelaporan terbuka, standar tata kelola, dan pengawasan parlemen serta publik.

Dengan demikian, Danantara dan BUMN dapat menjadi mesin transformasi ekonomi apabila dikelola sebagai institusi profesional, bukan instrumen patronase. Kuncinya adalah pemisahan yang jelas antara mandat pembangunan, mandat komersial, mekanisme investasi, pengawasan risiko, keterbukaan data, pencegahan konflik kepentingan, dan evaluasi kinerja. Negara boleh menjadi aktor ekonomi, tetapi negara tidak boleh menjadi ruang gelap bagi rente.

7. Hilirisasi dan Nasionalisme Sumber Daya

Arah ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh agenda hilirisasi, terutama mineral strategis seperti nikel. Hilirisasi berangkat dari gagasan yang benar: Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pengeksport bahan mentah bernilai tambah rendah. Kekayaan alam harus menjadi dasar industrialisasi, penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, penerimaan negara, dan peningkatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Namun hilirisasi juga perlu dibaca secara kritis. Warburton menunjukkan bahwa nasionalisme sumber daya di Indonesia tidak selalu murni berakar pada kepentingan rakyat luas; ia juga berkaitan dengan preferensi bisnis besar lokal dan konfigurasi relasi negara-bisnis. Kajian terbaru tentang nikel Indonesia juga menekankan bahwa kepentingan oligarkis dapat membentuk arah pengembangan nikel, termasuk ketergantungan pada investor tertentu dan risiko sosial-lingkungan. ([Taylor & Francis Online](#))

Hilirisasi hanya akan menjadi strategi pembangunan apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, nilai tambah benar-benar meningkat di dalam

negeri, bukan hanya memindahkan proses awal dari luar negeri ke kawasan industri domestik. Kedua, teknologi dan keterampilan nasional harus naik, sehingga Indonesia tidak sekadar menyediakan tanah, listrik murah, air, buruh, dan bahan baku. Ketiga, dampak lingkungan harus dikendalikan secara ketat. Keempat, masyarakat lokal harus memperoleh manfaat nyata, bukan hanya menanggung polusi, konflik lahan, dan tekanan sosial. Kelima, struktur kepemilikan dan kontrak harus transparan agar rente tidak hanya mengalir kepada segelintir aktor.

Di sinilah politik kekuasaan menentukan arah hilirisasi. Bila negara cukup kuat untuk menegosiasikan kepentingan nasional, menegakkan standar lingkungan, melindungi buruh, dan membangun kemampuan teknologi domestik, hilirisasi dapat menjadi jalan transformasi. Namun bila negara terlalu dekat dengan kepentingan bisnis tertentu, hilirisasi dapat berubah menjadi ekstraksi baru dengan label nasionalisme ekonomi.

8. Oligarki, Demokrasi, dan Ekonomi Pasca-Reformasi

Reformasi politik membuka ruang demokrasi, tetapi demokrasi elektoral tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi. Pemilihan umum langsung, desentralisasi, kebebasan pers, dan multipartai menciptakan ruang partisipasi, tetapi biaya politik yang tinggi juga memperkuat ketergantungan politisi pada modal. Akibatnya, pengusaha besar dapat menjadi sponsor politik, politisi menjadi broker proyek, dan kebijakan publik menjadi arena pertukaran dukungan.

Hadiz dan Robison menekankan bahwa oligarki Indonesia tidak hilang setelah Reformasi; ia beradaptasi dan mereorganisasi diri dalam institusi demokrasi dan pasar. ([Find an Expert](#)) Artinya, demokrasi formal dapat hidup berdampingan dengan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Pemilu berlangsung, tetapi akses terhadap pencalonan, kampanye, media, jaringan partai, dan pembiayaan politik tetap timpang. Dalam situasi seperti ini, rakyat mempunyai hak suara, tetapi elite mempunyai kapasitas lebih besar untuk membentuk pilihan politik dan arah kebijakan.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap ekonomi. Kebijakan industri, izin tambang, tata ruang, proyek infrastruktur, impor pangan, subsidi energi, pengadaan barang, perizinan digital, dan insentif pajak dapat dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki akses politik. Karena itu, reformasi ekonomi tidak cukup berbicara tentang deregulasi. Deregulasi dapat membantu bila menghapus hambatan birokrasi yang tidak perlu. Tetapi deregulasi juga dapat berbahaya bila melemahkan perlindungan sosial, lingkungan, buruh, dan masyarakat adat. Yang dibutuhkan bukan sekadar lebih sedikit aturan, melainkan aturan yang lebih adil, transparan, konsisten, dan tidak mudah dibajak.

9. Desentralisasi: Pemerataan atau Fragmentasi Kekuasaan?

Desentralisasi adalah salah satu capaian penting Reformasi. Ia dimaksudkan untuk mendekatkan keputusan kepada masyarakat, memperkuat otonomi daerah, mengurangi sentralisme Jakarta, dan memungkinkan pembangunan yang sesuai konteks lokal. Namun desentralisasi juga menghasilkan dinamika ekonomi politik baru. Kekuasaan yang dulu terkonsentrasi di pusat sebagian berpindah ke daerah. Akibatnya, patronase, rente, dan oligarki lokal dapat tumbuh di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam pembangunan ekonomi, desentralisasi menghadirkan peluang dan risiko. Peluangnya adalah daerah dapat mengembangkan keunggulan lokal: pariwisata, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, industri kecil, energi terbarukan, dan konektivitas regional. Risiko utamanya adalah fragmentasi kebijakan, tumpang tindih perizinan, kompetisi fiskal tidak sehat, korupsi lokal, dan lemahnya kapasitas teknokratis di sebagian daerah.

Fakta bahwa Pulau Jawa masih menyumbang lebih dari separuh struktur ekonomi nasional menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan spasial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan strategi ekonomi yang tidak hanya berpusat pada Jawa. Konektivitas maritim, logistik antarpulau,

pendidikan vokasi daerah, digitalisasi layanan publik, akses energi, dan penguatan pusat pertumbuhan luar Jawa menjadi agenda strategis. Tanpa itu, pembangunan akan terus terkonsentrasi, dan ketimpangan wilayah dapat berubah menjadi ketimpangan politik.

10. Pangan, Energi, dan Politik Kedaulatan

Arah ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu pangan dan energi. Keduanya bukan sekadar komoditas, melainkan sumber legitimasi politik. Harga beras, minyak goreng, BBM, listrik, LPG, dan transportasi langsung memengaruhi persepsi rakyat terhadap pemerintah. Karena itu, pemerintah cenderung sangat berhati-hati dalam menaikkan harga energi atau pangan, meskipun subsidi yang besar dapat menekan APBN.

World Bank pada Juni 2026 memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2026 melambat ke sekitar 5% karena tekanan fiskal, termasuk peningkatan belanja pemerintah dan biaya subsidi bahan bakar akibat kenaikan harga minyak; laporan itu juga menilai subsidi umum cenderung lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu dan menyarankan pergeseran menuju bantuan yang lebih tepat sasaran. ([Reuters](#)) Di sinilah tampak dilema ekonomi politik: subsidi energi menjaga stabilitas sosial jangka pendek, tetapi dapat mengurangi ruang fiskal untuk investasi produktif jangka panjang. Mengurangi subsidi dapat memperbaiki fiskal, tetapi berisiko memicu protes sosial bila tidak disertai kompensasi yang adil.

Kebijakan pangan juga mengandung dimensi kekuasaan. Importir, pedagang besar, petani, konsumen, BUMN pangan, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas mempunyai kepentingan berbeda. Ketika harga pangan naik, konsumen dirugikan. Ketika harga ditekan terlalu rendah, petani dirugikan. Ketika impor dibuka tanpa tata kelola, produsen lokal tertekan. Ketika impor dibatasi tanpa peningkatan produksi, konsumen membayar harga mahal. Karena itu, kedaulatan pangan bukan sekadar slogan produksi sendiri, melainkan kemampuan

negara membangun sistem pangan yang produktif, efisien, adil, dan tahan guncangan.

11. Investasi, Pasar Modal, dan Kepercayaan

Dalam ekonomi terbuka, kekuasaan tidak hanya datang dari dalam negeri. Investor global, lembaga pemeringkat, indeks pasar modal, bank investasi, pasar obligasi, dan nilai tukar juga memengaruhi ruang gerak kebijakan nasional. Reuters melaporkan bahwa MSCI pada Juni 2026 menunda keputusan terkait kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market ke frontier market hingga November, dengan tuntutan reformasi seperti peningkatan free float, penurunan ambang pelaporan kepemilikan, dan perbaikan transparansi. Reuters juga mencatat bahwa penurunan klasifikasi dapat memicu arus keluar modal hingga US\$13 miliar. ([Reuters](#))

Kasus ini menunjukkan bahwa arah ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persepsi kredibilitas institusi. Pasar tidak hanya melihat pertumbuhan, tetapi juga tata kelola, transparansi, perlindungan investor, kedalaman pasar, konsentrasi kepemilikan, dan konsistensi kebijakan. Bila pasar melihat kebijakan terlalu politis, fiskal terlalu longgar, regulasi tidak konsisten, atau institusi tidak transparan, premi risiko meningkat. Dampaknya dapat muncul dalam bentuk pelemahan rupiah, kenaikan yield obligasi, penurunan IHSG, dan mahalanya biaya pembiayaan.

Namun kepentingan investor juga tidak boleh menjadi satu-satunya kompas ekonomi. Negara harus menjaga kepercayaan pasar, tetapi tidak boleh menyerahkan seluruh kebijakan publik kepada preferensi pasar finansial. Tantangan Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kredibilitas makro dan mandat sosial. Stabilitas diperlukan agar pembangunan berjalan. Tetapi stabilitas yang mengabaikan keadilan akan rapuh. Sebaliknya, kebijakan sosial yang mengabaikan stabilitas akan kehilangan daya tahan fiskal. Politik ekonomi yang matang harus mampu menggabungkan keduanya.

12. Transformasi Digital dan Kekuasaan Data

Arah ekonomi Indonesia ke depan semakin ditentukan oleh digitalisasi, kecerdasan buatan, pusat data, fintech, e-commerce, platform logistik, dan ekonomi berbasis data. Reuters melaporkan bahwa Indonesia sedang menyiapkan integrasi AI dalam berbagai program pemerintah, termasuk program makan gratis, kesehatan, dan inisiatif strategis lain, dengan rencana adopsi lintas kementerian dan daerah periode 2026–2029.

([Reuters](#)) Ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan kini memasuki wilayah baru: kekuasaan data dan algoritma.

Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, inklusi keuangan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengawasan program sosial. Namun digitalisasi juga dapat memperbesar konsentrasi kekuasaan apabila data publik dikuasai segelintir platform, algoritma tidak transparan, keamanan siber lemah, dan masyarakat tidak memiliki literasi digital yang memadai. Dalam ekonomi digital, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pemilik tanah atau modal finansial, tetapi juga oleh pemilik data, infrastruktur komputasi, model AI, jaringan platform, dan akses pengguna.

Indonesia perlu membangun kedaulatan digital yang demokratis. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari investasi asing atau teknologi global. Kedaulatan digital berarti kemampuan negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa data warga dilindungi, algoritma dapat diaudit, manfaat ekonomi digital dibagi lebih adil, UMKM tidak hanya menjadi penyewa platform, dan infrastruktur digital mendukung produktivitas nasional. Tanpa tata kelola semacam itu, ekonomi digital dapat menjadi bentuk baru ketergantungan.

13. Kelas Menengah, Pekerja, dan Kerapuhan Sosial

Arah ekonomi Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kelas menengah dan pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan

pekerjaan informal, upah stagnan, biaya hidup tinggi, pendidikan mahal, perumahan sulit dijangkau, dan perlindungan sosial terbatas akan menciptakan kerapuhan sosial. World Bank mencatat bahwa Indonesia telah menurunkan kemiskinan secara signifikan sejak 1999 hingga sebelum pandemi, tetapi pada Maret 2025 tingkat kemiskinan resmi masih 8,5% atau sekitar 23,9 juta orang. ([World Bank](#)) Data ini menunjukkan bahwa kemajuan memang ada, tetapi basis kesejahteraan masih rentan.

Masalah penting bukan hanya kemiskinan absolut, tetapi juga kerentanan. Banyak rumah tangga tidak miskin secara statistik, tetapi mudah jatuh miskin bila terjadi sakit, PHK, gagal panen, kenaikan harga pangan, biaya sekolah, bencana, atau krisis ekonomi. Kelas menengah bawah sering kali menjadi kelompok yang paling cemas: tidak cukup miskin untuk memperoleh bantuan maksimal, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan pasar.

Dari perspektif politik, kelas menengah yang rapuh dapat bergerak ke dua arah. Ia dapat menjadi pendorong reformasi institusi, transparansi, dan layanan publik. Namun ia juga dapat menjadi basis populisme apabila merasa negara tidak melindungi, pasar tidak memberi peluang, dan elite hanya memperkaya diri. Karena itu, kebijakan ekonomi Indonesia harus memperhatikan kualitas pekerjaan, mobilitas sosial, akses pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan sosial adaptif.

14. Menuju Negara Pembangunan yang Demokratis

Indonesia membutuhkan negara pembangunan, tetapi bukan negara pembangunan otoriter. Negara pembangunan yang dibutuhkan adalah negara yang kapabel, visioner, profesional, dan mampu mengkoordinasikan transformasi ekonomi, tetapi tetap tunduk pada hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Warburton menyebut munculnya “new developmentalism” dalam pemerintahan Jokowi, terutama melalui fokus pada infrastruktur dan deregulasi, tetapi juga mengingatkan adanya gema masa lalu ketika tujuan pembangunan

dapat memomorduakan persoalan tata kelola. ([Taylor & Francis Online](#)) Syukri juga menganalisis bentuk “new developmental state” dalam konteks pemerintahan dan pembangunan Indonesia, termasuk bagaimana agenda pembangunan dapat berkaitan dengan kecenderungan otoritarianisme di tingkat tata kelola. ([smeru.or.id](#))

Negara pembangunan demokratis harus memiliki beberapa ciri. Pertama, kapasitas teknokratis yang kuat. Kebijakan industri, pangan, energi, digital, dan fiskal harus berbasis data, evaluasi, dan keahlian. Kedua, akuntabilitas politik. Program besar harus diawasi oleh DPR, BPK, KPK, media, akademisi, dan masyarakat sipil. Ketiga, koordinasi lintas sektor. Pembangunan tidak boleh terpecah dalam ego kementerian dan proyek sektoral. Keempat, partisipasi daerah dan masyarakat. Indonesia terlalu besar dan majemuk untuk dikelola hanya dengan komando pusat. Kelima, disiplin terhadap hasil. Program publik harus dievaluasi bukan dari besarnya anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap produktivitas, kesejahteraan, pemerataan, dan keberlanjutan.

15. Risiko Strategis Arah Ekonomi Indonesia

Ada beberapa risiko strategis yang perlu diperhatikan. Risiko pertama adalah populisme fiskal. Program populer dapat meningkatkan legitimasi jangka pendek, tetapi bila tidak produktif dan tidak terkelola, ia dapat menekan APBN. Risiko kedua adalah sentralisasi diskresi. Ketika terlalu banyak keputusan ekonomi terkonsentrasi pada pusat kekuasaan, risiko kesalahan kebijakan dan konflik kepentingan meningkat. Risiko ketiga adalah konsentrasi rente. Hilirisasi, BUMN, proyek strategis, dan pengadaan dapat menjadi ruang akumulasi rente bila transparansi lemah.

Risiko keempat adalah ketergantungan eksternal. Hilirisasi mineral yang terlalu bergantung pada modal, teknologi, dan pasar tertentu dapat menciptakan ketergantungan baru. Risiko kelima adalah kerusakan ekologis. Pertumbuhan berbasis ekstraksi sumber daya alam dapat menimbulkan biaya lingkungan besar yang tidak tercatat dalam PDB. Risiko

keenam adalah melemahnya demokrasi ekonomi. Bila kebijakan hanya menguntungkan kelompok besar dan mengabaikan UMKM, pekerja, petani, nelayan, masyarakat adat, dan daerah tertinggal, maka pertumbuhan akan kehilangan legitimasi sosial.

16. Agenda Kebijakan: Menata Kekuasaan agar Ekonomi Inklusif

Arah ekonomi Indonesia perlu ditata melalui agenda yang menghubungkan pertumbuhan dengan keadilan. Pertama, reformasi fiskal harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja dan perluasan basis penerimaan. Pajak harus lebih adil, administrasi pajak lebih modern, kebocoran dikurangi, dan belanja diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, riset, dan perlindungan sosial tepat sasaran.

Kedua, hilirisasi harus naik kelas menjadi industrialisasi berbasis teknologi. Indonesia tidak cukup membangun smelter; Indonesia harus membangun kemampuan rekayasa, riset material, manufaktur baterai, kendaraan listrik, energi bersih, standar lingkungan, dan tenaga kerja terampil. Ketiga, BUMN dan Danantara harus dikelola dengan prinsip tata kelola kelas dunia: transparansi, audit independen, pelaporan risiko, pemisahan mandat politik dan mandat komersial, serta akuntabilitas publik.

Keempat, demokrasi ekonomi harus diperkuat. Ini berarti kebijakan harus membuka akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, pelatihan, dan rantai pasok. Pekerja harus memperoleh perlindungan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan mobilitas. Petani dan nelayan harus memperoleh akses logistik, penyimpanan, pembiayaan, teknologi, dan harga yang adil. Kelima, transformasi digital harus etis dan inklusif. Data warga harus dilindungi, AI harus diaudit, dan platform digital harus mendukung persaingan sehat.

Keenam, pembangunan daerah harus menjadi agenda utama. Indonesia perlu memperkuat konektivitas maritim, logistik antarpulau, kawasan industri luar Jawa, pendidikan vokasi berbasis potensi daerah, energi terbarukan lokal, dan tata kelola desa-kota yang produktif. Ketujuh,

reformasi politik pembiayaan partai dan kampanye perlu dipertimbangkan secara serius. Selama politik berbiaya tinggi, kebijakan ekonomi akan terus rentan terhadap pengaruh pemodal besar.

17. Kesimpulan

Politik kekuasaan dan arah ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan. Ekonomi bukan hanya mesin produksi barang dan jasa, melainkan arena tempat kekuasaan menentukan distribusi kesempatan, risiko, dan manfaat. Indonesia memiliki modal besar: penduduk besar, sumber daya alam strategis, posisi geopolitik penting, pasar domestik luas, kelas menengah yang berkembang, potensi digital, dan pengalaman panjang mengelola krisis. Namun semua modal itu tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Kuncinya adalah institusi dan tata kelola kekuasaan.

Arah ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan negara menjawab dilema besar: bagaimana menjadi negara kuat tanpa menjadi negara rente; bagaimana mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan keadilan; bagaimana menjalankan program sosial besar tanpa merusak disiplin fiskal; bagaimana menarik investasi tanpa menyerahkan kedaulatan; bagaimana melakukan hilirisasi tanpa merusak lingkungan; bagaimana memperkuat BUMN tanpa membuka ruang patronase; bagaimana menggunakan AI dan data tanpa melanggar hak warga; dan bagaimana menjaga stabilitas tanpa mematikan demokrasi ekonomi.

Masa depan ekonomi Indonesia yang sehat bukan sekadar ekonomi yang tumbuh 5%, 6%, atau bahkan 8%. Masa depan yang sehat adalah ekonomi yang menghasilkan pekerjaan bermartabat, memperluas kelas menengah produktif, menurunkan ketimpangan, menjaga lingkungan, memperkuat daerah, melindungi kelompok rentan, dan membangun kepercayaan publik. Pertumbuhan hanya bermakna apabila ia disertai keadilan. Kekuasaan hanya sah apabila ia digunakan untuk kepentingan bersama. Dan pembangunan hanya berkelanjutan apabila rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama ekonomi nasional.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; instrumen fiskal utama pemerintah untuk mengatur pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan negara.

Demokrasi ekonomi

Keadaan ketika akses terhadap peluang ekonomi, aset produktif, pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kebijakan publik tidak hanya dinikmati elite, tetapi terbuka bagi masyarakat luas.

Developmental state

Negara yang memiliki kapasitas kuat untuk mengarahkan transformasi ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan jangka panjang melalui kebijakan strategis.

Diskresi kebijakan

Ruang kewenangan pemerintah untuk mengambil keputusan tertentu. Diskresi diperlukan dalam kebijakan publik, tetapi berisiko disalahgunakan apabila tidak diawasi.

Hilirisasi

Strategi meningkatkan nilai tambah komoditas dengan memproses bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor atau digunakan sebagai input industri lanjutan.

Institusi ekstraktif

Aturan dan organisasi yang memusatkan manfaat ekonomi-politik pada kelompok kecil serta membatasi partisipasi masyarakat luas.

Institusi inklusif

Aturan dan organisasi yang memperluas akses terhadap peluang, perlindungan hukum, partisipasi, dan mobilitas sosial.

Kedaulatan ekonomi

Kemampuan negara mengarahkan kebijakan ekonomi nasional sesuai kepentingan rakyat tanpa ketergantungan berlebihan pada aktor eksternal.

Kekuasaan ekonomi

Kemampuan aktor tertentu untuk memengaruhi produksi, distribusi, harga, investasi, regulasi, dan akses terhadap sumber daya.

Oligarki

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok kecil yang memiliki sumber daya besar untuk memengaruhi kebijakan publik.

Populisme fiskal

Penggunaan belanja negara untuk program populer jangka pendek yang dapat meningkatkan dukungan politik tetapi berisiko melemahkan keberlanjutan fiskal.

Regulatory capture

Situasi ketika lembaga pengatur lebih dipengaruhi oleh kepentingan industri atau kelompok kuat daripada kepentingan publik.

Rente ekonomi

Keuntungan yang diperoleh bukan karena produktivitas atau inovasi, melainkan karena akses istimewa, monopoli, izin, proteksi, atau kedekatan dengan kekuasaan.

State capture

Keadaan ketika aktor ekonomi-politik yang kuat memengaruhi pembentukan hukum, regulasi, dan kebijakan negara untuk keuntungan sempit.

Transformasi struktural

Perubahan struktur ekonomi dari sektor bernilai tambah rendah menuju sektor yang lebih produktif, berteknologi, dan menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Daftar Pustaka

Format APA 7 dengan DOI

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100. doi:10.1086/700936

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Political losers as a barrier to economic development. *American Economic Review*, 90(2), 126–130. doi:10.1257/aer.90.2.126

Block, F. (2003). Karl Polanyi and the writing of *The Great Transformation*. *Theory and Society*, 32, 275–306. doi:10.1023/A:1024420102334

Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003). The new comparative economics. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 595–619. doi:10.1016/j.jce.2003.08.005

Evans, P. B. (1989). Predatory, developmental, and other apparatuses: A comparative political economy perspective on the Third World state. *Sociological Forum*, 4(4), 561–587. doi:10.1007/BF01115064

Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. doi:10.1017/S1537592714001595

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. doi:10.5728/indonesia.96.0033

Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 751–773. doi:10.1016/j.jce.2003.09.006

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678

North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and commitment: The evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *The Journal of Economic History*, 49(4), 803–832. doi:10.1017/S0022050700009451

Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. doi:10.2307/2938736

Piketty, T., & Zucman, G. (2014). Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries 1700–2010. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), 1255–1310. doi:10.1093/qje/qju018

Rodrik, D. (2000). How far will international economic integration go? *Journal of Economic Perspectives*, 14(1), 177–186. doi:10.1257/jep.14.1.177

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. doi:10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. *World Politics*, 51(2), 297–322. doi:10.1017/S0043887100008200

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. doi:10.2307/3003160

Syukri, M. (2024). Indonesia's new developmental state: Interrogating participatory village governance. *Journal of Contemporary Asia*, 54(1), 1–24. doi:10.1080/00472336.2022.2089904

Warburton, E. (2016). Jokowi and the new developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. doi:10.1080/00074918.2016.1249262

Wijaya, T. (2025). Indonesia, nickel, and the political economy of resource-based industrialisation. *Third World Quarterly*.
doi:10.1080/01436597.2025.2465514

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 217June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a3fb765-ecdc-83ec-9118-52040ffe3a2e)). <https://chatgpt.com/c/6a3fb765-ecdc-83ec-9118-52040ffe3a2e> <https://chatgpt.com/c/6a367378-8ec0-83ec-9269-457be2689547>